

Bupati Buton Selatan H MuhAdios Tinjau Pelabuhan Lalole Memprihatinkan di Siompu dan Kawal Program Kampung Nelayan Merah Putih



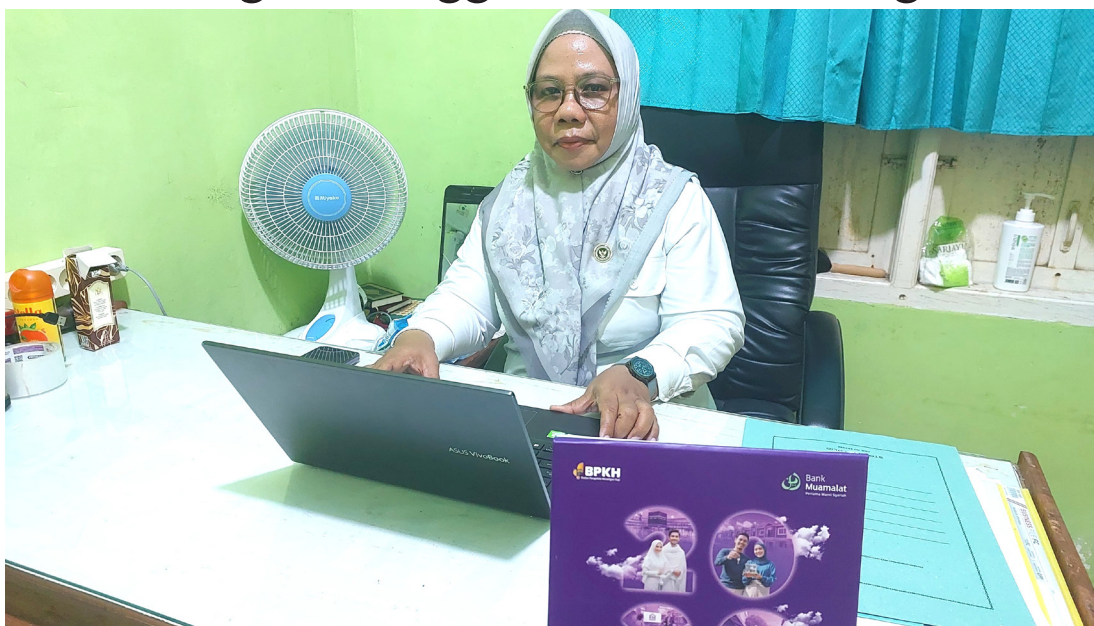
Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- emerintah Kabupaten Buton Selatan terus mendorong percepatan pembangunan wilayah pesisir melalui penguatan infrastruktur dan pemberdayaan nelayan. Upaya ini ditandai dengan kunjungan langsung Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., MBA ke Pulau Siompu, Minggu (3/5/2026), untuk meninjau kondisi pelabuhan serta kesiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Adios bersama rombongan lebih dahulu meninjau Desa Lamaningara guna melihat proses pengambilan data topografi sebagai bagian dari perencanaan pemba-

Lanjut ke Hal: 7

25 Jamaah Haji Buton Selatan Siap Berangkat Melalui Kloter 38 Makassar, Kepala Kemenhaj Busel Nurhayati Ingatkan Risiko Penipuan Digital Hingga Permintaan Uang



Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buton Selatan Hj Nurhayati

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Menjelang keberangkatan ibadah haji 2026, Kementerian Haji dan Umroh Buton Selatan mengingatkan jamaah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital berkedok pembaruan data. Imbauan ini disampaikan di tengah kesiapan jamaah haji Kabupaten Buton Selatan yang telah mencapai

sekitar 90 persen.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buton Selatan Hj Nurhayati mengatakan bahwa hampir seluruh tahapan utama telah diselesaikan, baik administrasi maupun kesehatan. "Persiapan jamaah sudah mencapai 90 persen, termasuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi wajib," ujar Nurhayati, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan seluruh jamaah telah menerima vaksinasi penting seperti meningitis, polio, influenza, hingga COVID-19 sebagai bagian dari standar kesehatan perjalanan ibadah haji. Dari sisi jumlah, jamaah asal Kabupaten Buton Selatan yang akan berangkat tahun ini tercatat sebanyak 25 orang, terdiri dari 11 per-

Lanjut ke Hal: 7

78 Pejabat Baubau Resmi Dilantik Wali Kota Baubau HYF, WFH Tak Jadi Alasan Tetap Tekankan Kinerja ASN



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, Sebanyak 78 pejabat administrator dan pengawas lingkungan Pemerintah Kota Baubau resmi dilantik oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, pada Sabtu (2/5/2026) di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat struktur organisasi serta mempercepat pencapaian target kinerja tahun anggaran 2026.

Langkah tersebut diambil di tengah tuntutan percepatan pemban-

gunan daerah yang memasuki triwulan kedua. Pemerintah Kota Baubau menilai, pengisian jabatan yang kosong melalui mekanisme promosi dan rotasi merupakan solusi untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik.

Dalam arahnya, Yusran Fahim menegaskan bahwa momentum pelantikan harus dimaknai sebagai titik awal peningkatan kinerja. "Pelantikan ini adalah langkah penguatan agar setiap lini pemerintahan siap mencapai target kinerja yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ia menambahkan, para pejabat yang baru dilan-

tik diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri. "Kita sudah memasuki triwulan kedua, tidak ada lagi ruang untuk berlama-lama. Semua harus langsung bekerja atau tancap gas," tegasnya.

Selain percepatan kinerja, Wali Kota juga menyoroti pentingnya penyerapan anggaran yang tepat waktu. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai jadwal guna mendukung

Lanjut ke Hal: 7

Jelang MTQ Sultra, Pemkab Buton Selatan Maksimalkan Peran Baznas dan ASN



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menargetkan peningkatan prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 2026 dengan memperkuat strategi pembinaan peserta serta sinergi lintas sektor, termasuk dukungan anggaran dari Baznas dan partisipasi aparatur sipil negara (ASN).

Target tersebut menge-

muka dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Buton Selatan, Sabtu (2/4/2026), yang dipimpin Asisten I Setda Buton Selatan Kaimuddin bersama sejumlah pemangku kepentingan daerah.

Dalam rapat itu, salah satu poin penting yang dibahas adalah optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, terutama dari kalangan ASN yang jumlahnya mencapai lebih dari 5.000 orang di lingkungan pemerintah daerah.

Usulan tersebut mencakup penambahan item infak dan sedekah dalam blanko pembayaran zakat, termasuk bagi pegawai di dinas, badan, kantor, hingga perusahaan daerah, sebagai upaya memperkuat pembiayaan kegiatan keagamaan seperti MTQ.

"Kami melihat potensi besar dari ASN. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber pendanaan berkelanjutan

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H MuhAdios Tinjau Pelabuhan Lalole Memprihatinkan di Siompu dan Kawal Program Kampung Nelayan Merah Putih

bangunan kawasan nelayan berbasis program nasional.

Kegiatan itu berlangsung bersamaan dengan kehadiran tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Perikanan Buton Selatan yang tengah melakukan pengukuran desain lapangan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Buton Selatan, Nafiruddin mengatakan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi program tersebut.

"Bupati menyempatkan diri bertemu langsung dengan masyarakat nelayan di Pulau Siompu. Saat itu tim KKP dan Dinas Perikanan sedang melakukan pengambilan desain topografi," ujarnya, Senin (4/5/2026).

Menurut Nafiruddin, pengawasan langsung oleh kepala daerah menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan masyarakat pesisir memperoleh manfaat dari program strategis nasional tersebut.

"Sejauh ini, Bupati terus mengawal agar masyarakat nelayan bisa mendapatkan ke-

hidupan yang lebih layak," tambahnya.

Selain agenda tersebut, Bupati Adios juga melakukan peninjauan ke Pelabuhan Lalole di Desa Lalole, Kecamatan Siompu Barat, usai menghadiri kegiatan Walimatussafar Haji di wilayah setempat.

Dalam peninjauan itu, ia menemukan kondisi pelabuhan yang mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai tidak lagi layak digunakan secara optimal oleh masyarakat.

"Saya kaget melihat kondisi pelabuhan ini. Masyarakat sebenarnya sudah membangun talud secara swadaya," kata Adios.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam penangan infrastruktur tersebut, sehingga pemerintah daerah harus mengandalkan dukungan dari pemerintah yang lebih tinggi.

"Kita tidak bisa mengharapkan APBD karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Ini akan kami ajukan ke balai provinsi dan juga ke pusat," ujarnya.

Bupati Adios menambahkan, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai akses

utama mobilitas orang dan distribusi logistik di wilayah kepulauan seperti Buton Selatan.

Karena itu, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan perbaikan infrastruktur tersebut melalui sinergi lintas pemerintahan.

"Kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur vital seperti pelabuhan ini," tegasnya.

Secara historis, pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia telah menjadi bagian penting dari kebijakan nasional sejak era Orde Baru hingga pemerintahan modern, terutama melalui program tol laut yang diperkuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah.

Di tingkat global, penguatan infrastruktur pesisir dan pelabuhan juga menjadi perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDGs), khususnya tujuan ke-9 tentang infrastruktur dan tujuan ke-14 mengenai ekosistem laut.

Dalam konteks tersebut, pembangu-

nan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan terintegrasi antara infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menilai program ini sebagai peluang besar untuk mendorong transformasi ekonomi nelayan, terutama di wilayah kepulauan seperti Siompu yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas.

Melalui kombinasi antara pembangunan pelabuhan dan pengembangan kawasan nelayan, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh program tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (*)

Jelang MTQ Sultra, Pemkab Buton Selatan Maksimalkan Peran Baznas dan ASN

untuk kegiatan keagamaan, ujar salah satu peserta rapat. Ketua Baznas Buton Selatan mengungkapkan hingga tahun 2026 pihaknya berhasil menghimpun dana sekitar Rp240 juta dari infak dan sedekah masyarakat di berbagai kecamatan, desa, dan kelurahan.

"Dari jumlah tersebut, kami siap mengalokasikan 10 persen untuk mendukung kegiatan MTQ dan program keagamaan lainnya," katanya. Namun demikian, ia menilai tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah, yakni baru sekitar 10 persen dari total populasi. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kesadaran berzakat dan bersedekah.

Sementara itu, Asisten I Setda Buton Selatan Kaimuddin menegaskan bahwa hasil rapat tersebut akan segera dilaporkan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Buton Selatan H Muh Adios untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret. "Kesepakatan ini akan kami sampaikan kepada

Bupati agar bisa direalisasikan secara optimal demi mendukung keikutsertaan Busel di MTQ tingkat provinsi," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran khusus untuk pembinaan peserta dan penyediaan fasilitas yang memadai guna menunjang kesuksesan kompetisi. "MTQ bukan sekadar lomba, tetapi bagian dari pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keagamaan," tegas Kaimuddin.

Rapat tersebut juga dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, tujuh Kepala KUA, seluruh Kepala OPD, serta tujuh camat se-Kabupaten Buton Selatan.

Secara historis, MTQ merupakan agenda nasional yang telah berlangsung sejak pertama kali digelar pada 1968 di Makassar, dan terus berkembang sebagai sarana pembinaan tilawah Al-Quran serta peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia.

Di tingkat interna-

sional, kegiatan serupa juga diselenggarakan di berbagai negara Muslim, seperti Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Kuala Lumpur yang telah berlangsung sejak 1961 dan menjadi salah satu ajang paling bergengsi bagi qari dan qariah dunia.

Di Indonesia, peran MTQ tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan karakter religius masyarakat serta penguatan identitas keislaman dalam kehidupan berbangsa.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah disepakati, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan optimis dapat tampil lebih kompetitif dalam MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara 2026 dan meraih hasil yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sinergi antara pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan, Baznas, serta masyarakat diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan target tersebut sekaligus memperkuat pembangunan berbasis nilai keagamaan di daerah. (*)

25 Jamaah Haji Buton Selatan Siap Berangkat Melalui Kloter 38 Makassar, Kepala Kemenhaj Busel Nurhayati Ingatkan Risiko Penipuan Digital Hingga Permintaan Uang

perempuan dan 14 laki-laki.

Rentang usia jamaah berkisar antara 40 hingga 75 tahun dengan rata-rata usia sekitar 60 tahun. Meski terdapat jamaah lanjut usia, kondisi kesehatan mereka dinilai masih memenuhi syarat untuk menjalankan ibadah.

Dalam hal teknis keberangkatan, jamaah haji Buton Selatan akan tergabung dalam Kloter 38 Embarkasi Makassar bersama lima daerah lainnya seperti Baubau, Bombana, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat, dengan total 393 jamaah.

Nurhayati mengungkapkan prosesi pelepasan resmi dijadwalkan berlangsung pada 5 Mei 2026 pukul 14.00 WITA di Gedung Lamaindo dan akan dihadiri Bupati Buton Selatan, H Muh Adios, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

"Pelepasan jamaah akan dilakukan secara resmi oleh pemerin-

tah daerah sebagai bentuk dukungan dan doa bersama," kata Nurhayati. Di tengah kesiapan tersebut, pihaknya menyoroti maraknya modus penipuan melalui pesan WhatsApp yang menagaskan instansi resmi dan meminta jamaah melakukan pembaruan data melalui tautan tertentu.

"Pesan tersebut tidak benar dan merupakan upaya penipuan. Kami minta jamaah tidak merespons apalagi mengklik link dari nomor tidak dikenal," tegasnya. Katanya, sejumlah jamaah haji Buton Selatan dilaporkan telah menerima pesan mencurigakan tersebut. Namun, mereka terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak kementerian haji dan umroh sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Langkah verifikasi sangat penting agar jamaah tidak menjadi korban penyalahgunaan data maupun penipuan finansial," ujarnya.

Secara historis, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia terus mengalami peningkatan sistem pelayanan. Sejak era digitalisasi yang dimulai pada dekade 2010-an, pengelolaan data jamaah menjadi lebih terintegrasi, meski di sisi lain membuka celah bagi kejahatan siber.

Dalam konteks global, otoritas Arab Saudi juga terus memperketat regulasi haji, termasuk sistem visa elektronik dan pengawasan kesehatan, terutama sejak pandemi COVID-19 yang sempat membatasi jumlah jamaah secara drastis pada 2020 - 2021.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, kuota nasional mencapai ratusan ribu orang, sehingga pengelolaan administrasi dan keamanan data menjadi perhatian utama pemerintah.

Oleh karena itu,

Nurhayati mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi berasal dari sumber resmi dan melakukan konfirmasi langsung ke kantor Kementerian Haji dan Umrah terdekat. "Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Keselamatan data pribadi jamaah harus menjadi prioritas," katanya.

Menjelang hari keberangkatan, jamaah haji Buton Selatan juga diminta menjaga kondisi fisik dengan memperbanyak istirahat dan menghindari aktivitas berat yang berisiko mengganggu kesehatan. Dengan persiapan yang hampir rampung, pihak Kementerian Haji dan Umroh Buton Selatan berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, lancar, dan khusyuk sesuai harapan. (*)

78 Pejabat Baubau Resmi Dilantik Wali Kota Baubau HYF, WFH Tak Jadi Alasan Tetap Tekankan Kinerja ASN

program pembangunan yang telah dirancang.

Konsolidasi internal menjadi aspek lain yang ditekankan dalam pelantikan ini. Para pejabat diminta membangun koordinasi yang solid di unit kerja masing-masing agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Menanggapi kebijakan efisiensi serta penerapan sistem kerja Work From Home (WFH), Yusran Fahim mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. "WFH bukanlah penghalang. Dengan adaptasi dan inovasi, kita tetap harus produktif dan memberikan pelayanan prima," katanya.

Secara historis, kebijakan rotasi dan promosi jabatan dalam birokrasi telah menjadi praktik umum di Indonesia sejak era reformasi 1998, yang menekankan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Di tingkat global, praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara untuk

menjaga dinamika organisasi dan mencegah stagnasi kinerja.

Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat melalui berbagai regulasi, termasuk penguatan sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan organisasi secara berkelanjutan.

Dalam konteks lokal, pelantikan pejabat di Kota Baubau juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wali Kota turut mengingatkan pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas. "Selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik. Bekerjalalah dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab," pesannya.

Ia juga menambahkan pesan moral kepada seluruh aparatur agar menjaga akhlak serta menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik. "Semoga Allah SWT senantiasa mem-

bimbing langkah kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutupnya.

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik meliputi berbagai posisi strategis, mulai dari camat, kepala bagian, hingga lurah. Di antaranya Camat Wolio Tegar Aryu Saputra, Kabag Kesra La Ode Maaruf, Kabag Umum Mustafa, serta Inspektur Pembantu Wilayah I La Ode Darmawan Hibali.

Selain itu, turut dilantik Sekretaris Dinas Perumahan Mo-hamad Salman, Kabid Pertanahan Dina Fainal, Kabid Cipta Karya Yudiarto, serta sejumlah lurah seperti Yinizal Nisaid, Jeny, Muslimat, Abdul Rasyid, Dinarti, Zamria, Zuliadin, Minarni, Asham, dan Anong Nani.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Baubau diharapkan mampu menjaga stabilitas organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. (*)

Prabowo Tetapkan RAN PE 2026-2029 Perkuat Strategi Lawan Terorisme



Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2026-2029.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP.— Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026-2029 sebagai langkah strategis nasional dalam menghadapi ancaman ekstremisme dan terorisme.

Peraturan tersebut resmi berlaku sejak 9 Februari 2026 dan menjadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa RAN PE merupakan kebijakan nasional yang memuat arah, strategi, serta prioritas dalam menangani potensi radikalisme yang berujung pada aksi terorisme.

“RAN PE ini ditetapkan untuk 4 (empat) tahun yakni periode tahun 2026-2029,” demikian bunyi ketentuan dalam Pasal 2 Perpres tersebut.

Pemerintah memandang bahwa ancaman ekstremisme berbasis kekerasan perlu ditangani secara sistematis, terencana, terpadu, dan

berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi aksi teror yang merugikan masyarakat luas.

Dalam definisinya, ekstremisme berbasis kekerasan mencakup keyakinan atau tindakan yang menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem untuk mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Sementara itu, terorisme dijelaskan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menyebabkan korban massal, serta merusak objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, maupun fasilitas internasional.

“Terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan suasana teror secara meluas dan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal,” bunyi Pasal 1 ayat (3) Perpres tersebut.

Dalam implementasinya, pemerintah menetapkan sembilan pilar utama, di antaranya kesiapsiagaan nasional, penguatan ketahanan komunitas, peningkatan keterampilan masyarakat, serta perlindungan perempuan, pemuda, dan anak.

Selain itu, aspek komunikasi strategis, deradikalisasi, penegakan hak asasi manusia, perlindungan saksi dan korban, serta kerja sama

internasional juga menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.

“Upaya ini dilakukan secara terpadu lintas sektor untuk memastikan pencegahan berjalan efektif,” demikian salah satu penjelasan dalam dokumen kebijakan tersebut.

Pendanaan pelaksanaan program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah akan membentuk sekretariat bersama yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam penanganan ekstremisme dan terorisme.

Secara historis, Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi aksi terorisme, termasuk peristiwa Bom Bali 2002 yang menjadi titik balik penguatan kebijakan kontra-terorisme nasional.

Sejak saat itu, pemerintah membentuk berbagai instrumen penanganan, termasuk lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta memperkuat kerja sama internasional

dalam memerangi jaringan teror global.

Di tingkat global, upaya pencegahan ekstremisme juga menjadi perhatian serius komunitas internasional, terutama pasca peristiwa Serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat yang mendorong negara-negara memperkuat strategi kontra-terorisme.

Dalam konteks tersebut, RAN PE 2026-2029 diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional Indonesia sekaligus berkontribusi dalam upaya global melawan ekstremisme berbasis kekerasan.

“Kebijakan ini menjadi kerangka strategis nasional dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” demikian ditegaskan dalam Perpres tersebut.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah menargetkan terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan serta perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman terorisme. (*)

UU TPKS Perberat Hukuman Tokoh Agama Pelaku Kekerasan Seksual Kasus Ponpes Pati, DPR Desak Hukuman Maksimal Pelaku Kekerasan



Ketua DPR Puan Maharani menegaskan UU TPKS memberikan hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual, mendorong penegakan hukum dan perlindungan korban.

Laporan: Radit

JATENG, BP.— Aparat kepolisian menetapkan seorang pengasuh pondok pesantren berinisial AS sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Kabupaten Pati. Penetapan tersebut dilakukan pada 28 April 2026, setelah laporan yang masuk sejak 2024 mulai ditindaklanjuti secara intensif.

Kabag Ops Polresta Pati, AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, mengatakan bahwa proses hukum kini memasuki tahap pemanggilan tersangka untuk pemeriksaan lanjutan. “Penetapan tersangka sudah dilakukan sejak 28 April 2026, dan saat ini kami melanjutkan proses penyelidikan serta pemeriksaan,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (3/5).

Kasus ini mencuat ke publik setelah salah satu korban yang telah lulus dari pesantren tersebut memberanikan diri mengungkapkan dugaan pelecehan yang dialaminya sejak 2024. Dengan pendampingan keluarga, laporan resmi disampaikan kepada aparat pada September 2024, namun penanganannya dinilai berjalan lambat.

Lambannya proses hukum tersebut memicu aksi demonstrasi warga dan korban di depan lokasi pondok pesantren pada Sabtu (2/5). Mereka mendesak aparat untuk segera menuntaskan kasus serta memberikan keadilan bagi para korban.

Sehari setelah aksi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati mer-

ekomendasikan penutupan sementara pondok pesantren terkait. Opsi penutupan permanen juga tengah dipertimbangkan, sembari menyiapkan langkah relokasi bagi para santri.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa negara memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menjerat pelaku kekerasan seksual, terutama yang memiliki posisi otoritas.

Menurutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memungkinkan adanya pemberatan hukuman bagi pelaku yang memanfaatkan relasi kuasa terhadap korban.

“Ancaman hukuman dapat ditambah apabila pelaku adalah tokoh agama, pendidik, atau pihak yang memiliki relasi kuasa khusus,” kata Puan dalam keterangan resminya, Senin (4/5).

Ia juga menekankan bahwa posisi pelaku sebagai pengasuh pesantren memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang membuat korban sulit melapor. “Ketika korban berada dalam posisi yang tidak memiliki akses bantuan, persoalannya juga terletak pada sistem perlindungan yang belum optimal,” ujarnya.

Selain itu, Puan mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi maksimal guna memberikan efek jera serta melindungi masa depan korban yang sebagian besar masih berusia anak.

“Para korban berhak mendapatkan perlindungan keamanan, pendamp-

ingan hukum, serta pemulihan psikologis tanpa hambatan,” tegasnya.

Secara historis, Indonesia telah mengalami berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan keagamaan yang memicu lahirnya UU TPKS pada 2022. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memperluas definisi kekerasan seksual sekaligus memperkuat perlindungan korban.

Dalam konteks global, lembaga seperti United Nations melalui berbagai laporan menegaskan bahwa kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, termasuk di lingkungan pendidikan dan keagamaan, merupakan masalah serius yang terjadi di banyak negara.

Di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, skandal kekerasan seksual oleh tokoh agama juga mendorong reformasi hukum serta penguatan mekanisme perlindungan korban.

Kasus di Pati ini kembali menegaskan pentingnya implementasi efektif UU TPKS, tidak hanya dalam penindakan pelaku, tetapi juga dalam memastikan sistem perlindungan korban berjalan optimal.

Ke depan, transparansi proses hukum serta keberpihakan terhadap korban menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. (*)

Momentum HUT Konwel, Gubernur Sultra ASR Tinjau Jalan Rusak, Janji Perbaiki Segera Dimulai



Laporan: Mashuri

S U L T R A , BP-Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi di Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Kepastian tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Konawe Selatan, Sabtu (2/5/2026).

Pernyataan itu ditegaskan gubernur usai meninjau langsung kondisi jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena rusak dan menghambat mobilitas warga serta aktivitas ekonomi. "Saya sudah menandatangani persetujuan untuk pengaspalan jalan provinsi di Lalembuu. Ini bentuk komitmen pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat," ujar gubernur.

Ruas jalan sepanjang sekitar 20 kilometer tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pedesaan.

Kegiatan peninjauan itu merupakan bagian dari rangkaian peringat

tan HUT Konawe Selatan yang dipusatkan di lapangan upacara Kantor Bupati Konawe Selatan. Dalam kegiatan tersebut, gubernur bertindak sebagai inspektur upacara.

Upacara peringatan HUT daerah itu juga dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, yang tahun ini mengusung tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semuanya".

Dalam amanatnya, gubernur menegaskan bahwa peringatan hari jadi daerah tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk evaluasi kinerja pembangunan.

"Peringatan ini harus menjadi refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, usia 23 tahun bagi Konawe Selatan merupakan fase penting dalam perjalanan pembangunan daerah yang masih tergolong muda, namun memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat.

Kabupaten Konawe Selatan sendiri resmi dibentuk pada tahun 2003 sebagai hasil pemekaran wilayah dari Ka-

bupaten Konawe, sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang mulai diperkuat pasca reformasi 1998 di Indonesia.

Secara nasional, kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur pembangunan sesuai potensi masing-masing.

Fenomena desentralisasi ini juga sejalan dengan tren global, di mana banyak negara mendorong penguatan pemerintahan lokal untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pemerintahan pembangunan.

Dalam konteks tersebut, gubernur menilai capaian pembangunan Konawe Selatan selama lebih dari dua dekade menjadi modal penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.

"Mari jadikan HUT ke-23 Konawe Selatan dan Hardiknas sebagai momentum memperkuat kebersamaan menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan

sejahtera," ujarnya.

Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah provinsi juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan melalui berbagai program, termasuk penyerahan seragam sekolah gratis bagi siswa SMA, SMP, dan SD.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penanaman prasasti penggunaan gedung hasil revitalisasi untuk jenjang SMP, SD, TK/PAUD, serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pemerintah turut memberikan penghargaan di bidang pendidikan dan pembangunan daerah, termasuk penyerahan hadiah Garuda Mepokoaso sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan prestasi masyarakat.

"Insya Allah segera kita tangani agar aktivitas masyarakat lebih lancar dan ekonomi bisa berkembang," kata gubernur menegaskan.

Peringatan HUT ke-23 Konawe Selatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. (*)

Google Resmi Patuh PP Tunas, Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak YouTube Ikuti Regulasi RI, Pembatasan Usia Pengguna Mulai Diterapkan



Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital setelah perusahaan teknologi global Google secara resmi menyatakan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Langkah ini ditandai dengan penyerahan surat kepatuhan oleh Google melalui platform YouTube kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, yang kemudian mendapat apresiasi langsung dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026), Meutya menegaskan bahwa kepatuhan ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak. "Pemerintah mengapresiasi karena YouTube yang berada di bawah Google telah menyampaikan surat kepatuhan secara resmi," ujarnya.

Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah sebelumnya telah memberikan tenggat waktu hingga Juni 2026 kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk menyampaikan self-assessment sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.

Sejumlah langkah konkret mulai diterapkan oleh YouTube sebagai bagian dari kepatuhan tersebut. Platform ini membatalkan batas usia minimum 16 tahun

bagi pengguna, disertai notifikasi khusus serta rencana penonaktifan akun yang terindikasi dimiliki oleh anak di bawah usia tersebut.

Selain itu, YouTube juga mulai menghapus iklan yang secara spesifik menargetkan anak-anak dan remaja. Kebijakan ini sejalan dengan upaya global dalam membatasi eksploitasi data anak oleh platform digital.

Perwakilan YouTube Indonesia, Danny Ardianto, menegaskan dukungan pihaknya terhadap kebijakan pemerintah. "Kami terus berfokus menjaga ruang digital di platform kami tetap aman serta mendukung generasi digital di masa mendatang," katanya.

Sementara itu, Director of Government Affairs and Public Policy YouTube Asia Pacific, Celeste Campbell-Pitt, turut hadir dalam pertemuan dengan pemerintah sebagai bagian dari komunikasi intensif antara regulator dan platform global.

Menurut Meutya, hingga saat ini terdapat tujuh platform digital yang telah menyatakan kepatuhan terhadap PP Tunas, termasuk Meta Platforms (Instagram, Facebook, Threads), TikTok, X Corp., serta Bigo Live. Satu platform lainnya masih dalam proses komunikasi.

"Delapan perusahaan ini menjadi role model bahwa jika mau, pasti bisa," tegas Meutya dalam pernyataannya.

Secara historis, penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital di Indonesia mulai mengemuka sejak revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 2016, yang kemudian diperkuat dengan

berbagai kebijakan turunan, termasuk PP Tunas pada 2025.

Di tingkat global, langkah serupa telah lebih dulu diterapkan di berbagai negara. Uni Eropa, misalnya, melalui General Data Protection Regulation (GDPR) menetapkan perlindungan ketat terhadap data anak, sementara Amerika Serikat memiliki Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) yang mengatur batasan pengumpulan data pengguna di bawah usia 13 tahun.

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam menyusun kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang pesat.

Pemerintah menegaskan bahwa kepatuhan administratif harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan. Pengawasan akan dilakukan secara bertahap melalui laporan berkala dari setiap platform.

"Ke depan, kami akan terus memantau implementasi ini, termasuk penertiban akun pengguna di bawah usia 16 tahun," ujar Meutya menambahkan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman, sehat, dan bertanggung jawab, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok pengguna yang paling rentan.

Dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia yang telah melampaui 200 juta pengguna dalam beberapa tahun terakhir, perlindungan anak di ruang digital menjadi isu krusial yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. (*)

Hardiknas 2026, Buton Tengah Perkuat Arah Pendidikan Inklusif



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan melalui pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Kantor Bupati, Sabtu (2/5/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buton Tengah, Azhari, selaku inspektur upacara. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Muh. Adam Basan, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, serta jajaran perangkat daerah dan insan pendidikan dari berbagai jenjang.

Momentum Hardiknas tahun ini dimaknai sebagai ajakan memperkuat kolaborasi seluruh elemen dalam menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di daerah.

Dalam amanatnya, Bupati membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia melalui pendekatan yang tulus dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

"Pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Intinya adalah memuliakan," ujar Azhari saat membacakan sambutan tersebut.

Lebih jauh, pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ditetapkan sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pemahaman konseptual yang lebih kuat pada peserta didik.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan pendukung, mulai dari pambangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan sarana dan prasarana guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Selain itu, penguatan kompetensi guru menjadi perhatian serius. Melalui program pelatihan, beasiswa, dan sertifikasi, pemerintah berupaya meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik sebagai ujung tombak pendidikan.

"Guru adalah teladan dan agen pembelajaran yang menentukan keberhasilan pendidikan," demikian salah satu poin penting dalam sambutan tersebut.

Upaya peningkatan mutu pendidikan juga diarahkan pada penguatan literasi, numerasi, serta pengembangan bidang STEM guna menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Di sisi lain, pemerintah memperluas akses pendidikan melalui berbagai layanan inklusif, seperti pendidikan jarak jauh, sekolah terbuka, serta layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni asah, asih, dan asuh, kembali ditegaskan sebagai fondasi dalam membentuk karakter generasi bangsa.

"Konsep asah, asih, dan asuh harus terus dihidupkan dalam praktik pendidikan kita sehari-hari," kata Azhari dalam amanatnya.

Secara historis, peringatan Hardiknas di Indonesia ditetapkan setiap 2 Mei, bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan nasional. Sejak pertama kali diperingati pada 1959 melalui Keputusan Presiden RI, Hardiknas menjadi simbol komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

Dalam konteks global, perhatian terhadap pendidikan juga tercermin dalam agen-

da UNESCO yang menetapkan pendidikan berkualitas sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan keempat.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, sektor pendidikan dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Penguatan karakter peserta didik juga menjadi prioritas melalui penciptaan budaya sekolah yang aman, sehat, dan inklusif, termasuk program pencegahan perundungan dan pembiasaan perilaku positif.

Kegiatan upacara ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi refleksi bersama untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan di tingkat daerah agar selaras dengan agenda nasional dan global.

Melalui peringatan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)

Polres Buton Gelar Apel Kebangsaan Buruh, Pemda Beri Apresiasi



Laporan: La Harman

BUTON, BP-Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei, Polres Buton menggelar Apel Besar Kebangsaan Buruh Indonesia bertajuk "Jaga NKRI" di Pelataran Pelabuhan Banabungi, Pasarwajo, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara buruh, pemerintah, dan aparat keamanan guna menjaga stabilitas daerah.

Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah sebagai fondasi utama pembangunan. Ia menyebut kesejahteraan buruh tidak dapat dipisahkan dari stabilitas keamanan yang terjaga dengan baik.

"Kesejahteraan buruh adalah salah satu pilar utama kehidupan bangsa, dan stabilitas keamanan menjadi fondasi yang harus kita jaga bersama," ujar Ali Rais dalam amanatnya.

Selain apel, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para buruh di kawasan Pelabuhan Banabungi. Tak hanya itu, digelar pula coffee morning yang mempertemukan perwakilan buruh, pemerintah, dan kepolisian dalam suasana dialog terbuka.

Melalui forum tersebut, kepolisian menawarkan peran sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Optimalisasi desk ketenagakerjaan disebut menjadi salah satu langkah konkret untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Kapolres juga menekankan pentingnya ruang komunikasi

antara buruh, pengusaha, dan pemerintah agar potensi konflik dapat diminimalkan. "Kami siap memfasilitasi dialog yang konstruktif demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa yang hadir mewakili Bupati Buton memberikan apresiasi atas inisiatif Polres Buton dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada jajaran Polres Buton. Kegiatan ini menunjukkan kesiapsiagaan kita semua dalam menyambut agenda internasional May Day," ujar Syarifudin.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak buruh sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.

"Pemerintah daerah akan selalu terdepan dalam memberikan dukungan terhadap pemenuhan hak-hak buruh," tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Buton, unsur Forkopimda, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekda Buton selaku Plh Sekda, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Banabungi, Kepala Bidang Kesbangpol, serta jajaran pejabat utama Polres Buton.

Secara historis, peringatan Hari Buruh Internasional berakar dari perjuangan pekerja di Amerika Serikat pada 1 Mei 1886 yang menuntut jam kerja delapan

jam sehari. Peristiwa tersebut dikenal sebagai bagian dari rangkaian demonstrasi buruh yang berpuncak pada insiden Haymarket di Chicago.

Di Indonesia, May Day mulai diperingati sejak masa kolonial dan sempat ditiadakan pada era Orde Baru sebelum akhirnya kembali ditetapkan sebagai hari libur nasional pada 2013. Sejak itu, peringatan Hari Buruh kerap diwarnai aksi unjuk rasa, namun juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pekerja.

Dalam konteks lokal, apel kebangsaan yang digelar Polres Buton ini menjadi pendekatan preventif untuk memastikan peringatan May Day berlangsung damai dan produktif, tanpa mengganggu stabilitas daerah.

Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah daerah berharap hubungan industrial di Kabupaten Buton dapat terus terjaga dengan baik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga mencerminkan upaya membangun komunikasi yang inklusif antara semua pemangku kepentingan, sehingga potensi konflik dapat dikelola sejak dini.

Dengan demikian, momentum May Day tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga sarana memperkuat persatuan dan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

Pemerintah Intensifkan Skrining TB dan Renovasi Rumah di Papua

Intervensi Kesehatan Papua Dipercepat, Fokus TB dan Malaria Nasional



Peliput: Lisna

JAYAPURA, BP- Pemerintah memperkuat pendekatan berbasis komunitas dalam penanganan tuberkulosis (TB) di Tanah Papua melalui strategi jemput bola, termasuk pendampingan pasien oleh kader kesehatan dan keluarga, guna memastikan keberhasilan pengobatan sekaligus menekan angka penularan di masyarakat.

Langkah tersebut dipertegas dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, di Jayapura, Papua, pada 28 April 2026, yang menekankan pentingnya dukungan sosial bagi pasien TB agar tidak menjalani pengobatan secara sendiri.

“Pendekatan berbasis komunitas sangat penting. Pasien tidak boleh merasa sendiri. Harus ada dukungan dari keluarga, kader, dan lingkungan sekitar,” ujar Benjamin.

Selain penguatan peran masyarakat, pemerintah juga mendorong pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC sebagai ujung tombak penanganan di tingkat akar rumput. Program ini bertujuan memperlu-

as jangkauan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit menular.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut.

“Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengintensifkan deteksi dini melalui skrining aktif menggunakan X-ray portable yang dilakukan langsung di lapangan. Metode ini diawali dengan pelacakan kontak serumah pasien TB untuk menemukan kasus secara lebih cepat.

Menurut Benjamin, penggunaan teknologi X-ray portable menjadi solusi efektif, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan seperti Papua.

“Penanganan TB tidak cukup hanya dengan obat. Deteksi dini dan intervensi lingkungan menjadi

bagian penting dalam memutus rantai penularan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari intervensi menyeluruh, pemerintah turut menjalankan program renovasi rumah bagi pasien TB. Upaya ini difokuskan pada perbaikan ventilasi dan kondisi hunian yang dinilai berkontribusi terhadap penyebaran penyakit.

Lingkungan tempat tinggal yang sehat dinilai mampu mempercepat proses penyembuhan pasien sekaligus menekan risiko penularan di dalam keluarga maupun komunitas sekitar.

Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten berada di peringkat kedua atau ketiga global dalam jumlah kasus TB, bersama India dan China.

Pada tingkat nasional, program penanggulangan TB telah berlangsung sejak dekade 1990-an melalui strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course), yang kemudian diperkuat dengan pendekatan eliminasi TB 2030 oleh pemer-

intah Indonesia.

Di tingkat global, upaya eliminasi TB juga menjadi bagian dari target Sustainable Development Goals (SDGs), di mana WHO menargetkan penurunan signifikan angka kematian dan insiden TB pada 2030.

Dalam konteks tersebut, intervensi yang dilakukan di Papua mencerminkan pendekatan terintegrasi antara deteksi dini, pengobatan, perbaikan lingkungan, dan penguatan peran komunitas.

Pemerintah optimis strategi jemput bola yang dipadukan dengan teknologi kesehatan dan dukungan sosial dapat mempercepat penanganan TB, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua.

“Lingkungan tempat tinggal juga harus sehat agar pasien bisa sembuh optimal dan tidak menularkan ke orang lain,” kata Benjamin menegaskan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap upaya pengendalian TB tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga menasar akar persoalan, termasuk faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhi penyebaran penyakit.*

JAYAPURA- Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan penyakit menular di Tanah Papua, yang hingga kini masih menyumbang mayoritas kasus malaria nasional serta menghadapi tantangan serius dalam pengendalian tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, yang berlangsung pada 27 hingga 29 April 2026 di Jayapura dengan melibatkan enam provinsi di wilayah Papua.

Dalam keterangannya, Benjamin menegaskan bahwa Papua menjadi prioritas dalam program kesehatan nasional karena besarnya beban penyakit menular dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“Fokus utama kami saat ini adalah percepatan penanganan tuberkulosis dan malaria, karena lebih dari 90 persen kasus malaria nasional berada di Tanah Papua,” ujarnya.

Data menunjukkan, sekitar 95 persen kasus malaria nasional berasal dari Papua. Sementara itu, sekitar 12 persen orang dengan HIV di Indonesia juga berada di kawasan ini, menjadikannya wilayah dengan beban epidemiologis yang signifikan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat penemuan kasus TB serta kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hingga tuntas.

Wakil Menteri

Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan di lapangan.

“Pemerintah daerah memiliki peran strategis, mulai dari penguatan regulasi, penganggaran, hingga koordinasi lintas sektor agar layanan kesehatan berjalan optimal,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Drs. Mathius D. Fakhri, menyampaikan bahwa seluruh provinsi di Tanah Papua memiliki komitmen yang sama untuk menekan angka penyakit menular.

“Kami memiliki tekad bersama untuk bangkit dan menyelesaikan persoalan kesehatan ini. Dukungan pemerintah pusat menjadi energi bagi kami untuk bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Upaya penguatan intervensi ini juga merupakan bagian dari strategi nasional dalam mencapai target eliminasi malaria pada 2030, sejalan dengan komitmen global yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Secara historis, Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengendalian malaria sejak awal 2000-an, dengan penurunan signifikan kasus di wilayah barat Indonesia. Namun, Papua tetap menjadi kantong utama penyebaran penyakit tersebut.

Di tingkat global, laporan WHO menunjukkan bahwa sekitar 94 persen kasus malaria dunia masih terkonsentrasi di kawasan Afrika, namun Asia

Pasifik” termasuk Indonesia” masih menghadapi tantangan eliminasi penyakit tersebut.

Untuk tuberkulosis, Indonesia sendiri sejak lama masuk dalam tiga besar negara dengan beban TB tertinggi di dunia, bersama India dan Tiongkok. Upaya eliminasi TB menjadi salah satu prioritas global melalui strategi End TB Strategy yang dicanangkan sejak 2015.

Dalam konteks nasional, pemerintah telah meluncurkan berbagai program percepatan, termasuk pendekatan berbasis komunitas dan penguatan layanan primer untuk meningkatkan deteksi dini serta keberhasilan pengobatan.

Benjamin menegaskan bahwa pendekatan lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua yang kompleks.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pusat, daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat sangat menentukan keberhasilan program ini,” katanya.

Dengan penguatan intervensi yang terintegrasi dan berbasis data, pemerintah optimis angka penyakit menular di Papua dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Langkah ini sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkecil kesenjangan layanan kesehatan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.*

PT FAREN GRAFIKA



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Reformasi Polri Menguat, Enam Rekomendasi KPRP Diserahkan ke Presiden



Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Prabowo Subianto menerima enam rekomendasi strategis dari Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pertemuan di Istana Merdeka, Selasa (5/5). Rekomendasi tersebut mencakup pembenahan kelembagaan, penguatan pengawasan, hingga revisi regulasi sebagai bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang profesional dan modern.

Rekomendasi yang disampaikan KPRP itu menjadi bagian dari upaya menyempurnakan agenda reformasi Polri yang telah berjalan sejak era Reformasi 1998, ketika Polri dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia sebagai langkah awal membangun institusi penegak hukum yang mandiri dan akuntabel.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa reformasi kali ini akan difokuskan pada penguatan aturan dan pembatasan kewenangan secara lebih jelas, termasuk terkait penugasan anggota Polri di luar institusi.

"Tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja yang bisa diisi anggota Polri," ujar Jimly.

Salah satu poin penting yang direkomendasikan adalah revisi Undang-Undang No-

mor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Revisi tersebut dinilai mendesak untuk menyesuaikan dinamika hukum dan kebutuhan kelembagaan saat ini, sekaligus mengakomodasi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memunculkan interpretasi baru dalam penempatan personel Polri di lembaga lain.

Selain itu, KPRP juga menyoroti pentingnya pembenahan aturan internal melalui revisi delapan Peraturan Polri dan 24 Peraturan Kapolri sebagai fondasi reformasi jangka panjang hingga tahun 2029. Dalam aspek tata kelola, KPRP menekankan penerapan prinsip good governance dan clean government melalui perbaikan sistem manajerial, termasuk penguatan pengawasan, kepemimpinan, dan transformasi digital di tubuh Polri.

Anggota KPRP, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan harus berjalan seiring dengan peningkatan efektivitas tugas pokok Polri.

"Tugas kami adalah menyusun draf untuk disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian," kata Yusril.

Dalam rekomendasi lainnya, KPRP mengusulkan penguatan Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas indepen-

den. Kompolnas diharapkan memiliki kewenangan lebih luas, termasuk memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat kepada Kapolri.

KPRP menilai penguatan Kompolnas menjadi penting mengingat posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden, sehingga diperlukan mekanisme checks and balances yang lebih kuat dalam sistem pengawasan.

Di sisi lain, KPRP juga memastikan bahwa kedudukan Polri tidak berubah dan tetap berada di bawah Presiden tanpa pembentukan kementerian baru. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan efektivitas koordinasi dan stabilitas kelembagaan.

Mekanisme pengangkatan Kapolri pun tetap dipertahankan seperti saat ini, yakni melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Skema ini dinilai mampu menjaga keseimbangan kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

Secara historis, keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Kapolri merupakan bagian dari reformasi demokrasi pasca-1998 yang bertujuan memperkuat akuntabilitas publik. Model serupa juga diterapkan di sejumlah negara demokrasi lain, seperti Amerika Serikat, di mana pejabat tinggi penegak hukum harus melalui mekanisme persetujuan

legislatif.

Rekomendasi KPRP juga mengatur secara tegas penempatan anggota Polri di luar institusi. Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjaga profesionalisme aparat kepolisian.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan institusinya untuk menjalankan seluruh rekomendasi tersebut.

"Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti usulan-usulan yang akan membuat institusi ini menjadi lebih baik," ujar Listyo.

Pemerintah juga berencana menerbitkan Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden sebagai landasan operasional reformasi, yang akan dijalankan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri, sekaligus menempatkan institusi tersebut sejajar dengan praktik kepolisian modern di tingkat global, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Dengan enam rekomendasi tersebut, reformasi Polri memasuki fase baru yang lebih sistematis dan terukur, sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. (*)

Integrasi JKN dalam Layanan SIM Diuji di Medan, Dorong Kepesertaan Aktif



Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto bersama Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Firman Darmansyah di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Medan, Selasa (5/5).

Laporan: Hadi

MEDAN, BP-Upaya memperkuat kepesertaan program jaminan kesehatan nasional terus dilakukan pemerintah melalui integrasi layanan publik. BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menguji coba sistem terintegrasi yang mensyaratkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/5).

Uji coba tersebut berlangsung di Satpas Polrestabes Medan sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional untuk mengoptimalkan cakupan JKN. Sistem ini memungkinkan pengecekan status kepesertaan secara otomatis saat pemohon mengajukan permohonan SIM.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Firman Darmansyah, menilai bahwa langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan. "Kami akan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa kepesertaan JKN aktif kini menjadi bagian dari persyaratan administrasi," ujarnya.

Sistem yang diuji coba ini dirancang agar tetap menjaga kecepatan pelayanan. Petugas hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor peserta ke dalam Portal JKN untuk mengetahui status kepesertaan pemohon.

Jika ditemukan status tidak aktif, sistem akan secara otomatis menampilkan notifikasi berisi penyebab serta langkah yang

harus ditempuh untuk mengaktifkan kembali kepesertaan. Mekanisme ini diharapkan tidak menambah beban kerja petugas maupun memperlambat proses layanan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. "Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Program JKN dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, integrasi ini juga diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang secara resmi memasukkan kepesertaan JKN aktif sebagai salah satu syarat penerbitan SIM. "Kami mengapresiasi dukungan Polri dalam implementasi kebijakan ini," ucap Akmal.

Secara nasional, kebijakan ini telah mulai diperluas sejak November 2024. Pada tahap awal, kepesertaan aktif belum bersifat wajib, sehingga masyarakat yang belum terdaftar tetap dapat memperoleh SIM dengan catatan diberikan edukasi untuk segera bergabung dalam program JKN.

Sebelumnya, uji coba serupa telah dilaksanakan di tujuh wilayah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur pada periode Juli hingga September 2024.

Dari sisi historis, Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sendiri telah berjalan sejak 2014 sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hingga beberapa tahun terakhir, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 90 persen

populasi Indonesia, menjadikannya salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.

Secara global, integrasi layanan kesehatan dengan administrasi publik bukanlah hal baru. Sejumlah negara seperti Jerman dan Jepang telah lama menerapkan sistem jaminan kesehatan wajib yang terhubung dengan berbagai layanan publik guna memastikan kepatuhan masyarakat.

Akmal menyebut pendekatan integratif ini penting untuk menjaga keberlanjutan sistem. "Dengan semakin banyak masyarakat yang aktif menjadi peserta JKN, maka prinsip gotong royong dalam pembiayaan kesehatan dapat berjalan lebih baik," tuturnya.

Sementara itu, Firman menambahkan bahwa pihak kepolisian akan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi publik. "Kami akan membuat konten video singkat agar masyarakat lebih mudah memahami prosedur dan persyaratan terbaru," katanya.

Uji coba di Medan diharapkan menjadi model implementasi nasional ke depan, sekaligus memastikan pelayanan SIM tetap berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari reformasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis data.

Dengan integrasi ini, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam layanan administrasi, tetapi juga didorong untuk memiliki perlindungan kesehatan yang memadai. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem jaminan sosial nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. (*)

Hardiknas dan Otoda 2026, Baubau Dorong Kualitas Pendidikan Nasional



Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan otonomi daerah melalui upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 tahun 2026

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan otonomi daerah melalui upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Sabtu (2/5/2026).

Momentum tersebut tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ajang refleksi terhadap perjalanan panjang pendidikan nasional dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak era reformasi.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE menekankan pentingnya peran pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Ia membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyoroti urgensi transformasi pembelajaran di tingkat kelas.

"Jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas," ujar Yusran Fahim mengutip sambutan menteri.

Upacara berlangsung khidmat dengan nuansa kebhinekaan yang kuat. Seluruh peserta, mulai dari aparat sipil negara hingga pelajar,

mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan keberagaman budaya nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah La Ode Darus Salam, M.Si, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam amanatnya, pemerintah menegaskan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) sebagai strategi baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis di kalangan peserta didik.

Selain itu, terdapat lima kebijakan strategis yang menjadi prioritas nasional, yakni revitalisasi dan digitalisasi sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan karakter, pengembangan literasi dan STEM, serta pendidikan inklusif dan fleksibel.

"Transformasi pendidikan harus menyentuh aspek mendasar, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas pengajaran dan karakter peserta didik," kata Yusran Fahim.

Di sisi lain, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 menjadi refleksi penting atas implementasi desentralisasi yang dimulai sejak diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut menjadi tonggak perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik.

Secara historis, Hari Pendidikan Nasional sendiri diperingati setiap 2 Mei, bertepatan dengan hari lahir Ki Hadjar Dewantara, pelopor pendidikan nasional Indonesia. Sementara itu, secara global, transformasi pendidikan juga menjadi perhatian dunia, terutama sejak UNESCO mendorong konsep pendidikan inklusif dan berkelanjutan dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

Wali Kota Baubau menilai bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Ia menekankan perlunya integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kunci keberhasilan otonomi adalah sinkronisasi kebijakan serta keberanian daerah dalam berinovasi," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis outcome, di mana kinerja pemerintah tidak lagi diukur dari penyerapan anggaran, melainkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, kemandirian fiskal daerah menjadi perhatian utama, dengan mendorong optimalisasi pendapa-

tan asli daerah guna mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Dalam konteks kerja sama, Yusran Fahim menegaskan bahwa kolaborasi antar daerah harus diperkuat untuk mengatasi berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengembangan ekonomi regional.

"Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Baubau juga menyerahkan bantuan jaminan kematian kepada pekerja rentan dan pegawai non-ASN sebagai bentuk perlindungan sosial.

Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026, pemerintah turut menyalurkan bantuan paket sembako kepada buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kota Baubau.

Rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan dan penguatan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan beriringan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Momentum Hardiknas dan Otoda di Baubau tahun ini pun menjadi simbol sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju. (*)

Kabar Gembira ASN Baubau, Sekda Baubau La Ode Darus Salam Umumka TPP Segera Cair Disertai Evaluasi Kinerja



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) segera dicairkan dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan sebagai langkah strategis untuk menjaga kinerja aparatur sekaligus mendorong percepatan realisasi program di tengah memasuki akhir triwulan kedua tahun anggaran 2026.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel gabungan ASN di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Senin (4/5/2026). Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga disiplin serta mempercepat pelaksanaan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kami memastikan proses pencairan TPP ASN saat ini sedang berjalan dan diupayakan segera terealisasi dalam waktu dekat," ujar La Ode Darus Salam.

Menurutnya, kebijakan pencairan TPP ini tidak hanya sebagai pemenuhan hak ASN, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan motivasi kerja. Pemerintah daerah berharap tambahan penghasilan tersebut mampu berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Secara nasional, kebijakan pemberian TPP bagi ASN telah menjadi bagian dari reformasi birokrasi sejak awal 2000-an,

terutama setelah diberlakukannya sistem remunerasi di berbagai instansi pemerintah. Reformasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur sekaligus menekan praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Di tingkat internasional, kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah negara dengan sistem tunjangan berbasis kinerja (performance-based pay). Negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan dikenal berhasil meningkatkan kualitas layanan publik melalui pendekatan tersebut, yang kemudian menjadi referensi bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyoroti posisi saat ini yang telah memasuki bulan Mei, yang berarti mendekati akhir triwulan kedua. Ia meminta seluruh OPD untuk tidak menunda pelaksanaan program kerja.

"Kita sudah berada di bulan Mei, jangan sampai ada keterlambatan. Percepatan ini penting agar target realisasi anggaran dapat tercapai secara maksimal," tegasnya.

Selain fokus pada percepatan program, perhatian juga diberikan kepada pejabat yang baru dilantik, termasuk camat, lurah, dan kepala puskesmas. Mereka diminta segera beradaptasi dan mengambil langkah cepat dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

La Ode Darus Salam menekankan bahwa kemampuan beradaptasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pelayanan

publik di tengah dinamika pemerintahan daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif.

"Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Pada bagian lain, Sekda memberikan apresiasi kepada Kecamatan Murhum yang sukses melaksanakan tugas sebagai pelaksana upacara. Ia berharap kecamatan lain dapat mencontoh kesiapan tersebut pada jadwal berikutnya.

Ia juga mengapresiasi seluruh OPD yang telah disiplin dalam melaporkan dokumentasi kegiatan apel melalui platform yang disediakan. Menurutnya, hal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menutup arahannya, Sekda mengajak seluruh ASN untuk tetap bekerja dengan semangat dan optimisme, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan masyarakat.

"Tetaplah bekerja dengan penuh semangat dan optimis. Mari kita jaga kedisiplinan dalam mengabdikan kepada masyarakat," tutupnya.

Dengan rencana pencairan TPP tersebut, Pemerintah Kota Baubau berharap kinerja ASN semakin meningkat dan berdampak pada percepatan pembangunan daerah, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang terus digalakkan pemerintah pusat. (*)